



Pejabat Kejati Mendadak "Sakit Gigi"

Saat Ditanya Soal Kabar SP3 Dugaan Korupsi BPD Bali

DENPASAR-Reaksi sikap plin-plan ditunjukkan pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pasca mencuatnya kabar adanya lobi-lobi para elit yang berujung dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan korupsi investasi senilai Rp 200 miliar di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Jika sebelumnya optimistis dan bersemangat menyampaikan penyidik sudah

mengantongi lima calon tersangka, mendadak pasca adanya kabar SP3, para pejabat khususnya di bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Bali mendadak "sakit gigi".

Seperti halnya Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Polin Oktavianus Sitanggang. Saat dikonfirmasi terkait perkembangan kabar adanya lobi-lobi dan SP3 itu pun juga memilih untuk tidak berkomentar. "Saya belum ada perintah ini. Gak berani press rilis saya (soal kasus dugaan Korupsi BPD Bali), kalau belum ada perintah (Kepala Kejati). Tunggu perintah dulu saya,"dalih Polin yang dicegat di lobi kantor Kejati Bali, usai rapat beberapa waktu lalu.

Demikian juga Polin saat ditanya perkembangan secara umum penyidikan kasus ini, didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Bali Edwin Beslar, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Siantar-Simalungun, Sumatera Utara, ini lagi-lagi memilih enggan menjelaskan."Itu penyidikan kan

tidak boleh dikeluarkan,"dalihnya lagi.

Apakah dengan begitu artinya kasus dugaan korupsi BPD Bali akan tetap dihentikan ataukah tetap lanjut? Ditanya begitu, Polin secara diplomatis mengatakan, pertanyaan itu sudah masuk pada inti perkara."Pokoknya kalau saya itu inginnya penanganan perkara itu kalau bisa naik dinaikkan, kalau berhenti berhentikan. Itu aja. Tapi apapun intinya secara yuridis bisa dipertanggungjawabkan,"tandasnya.

Lalu bagaimana soal pertanggungjawaban dari penyidikan perkara dugaan korupsi BPD Bali yang sebelumnya sudah mengantongi lima calon tersangka? Menurut Polin sama. "Semua lini sama termasuk BPD Bali. Susah saya kalau dalam perkara seperti (kasus BPD Bali) ini. Kecuali dakwaan sudah dibacakan, itu baru terbuka untuk umum. Jadi soal lanjut atau tidak, semua penanganan itu ada ujungnya dengan alasan-alasan hukumnya,"dalih Polin lagi sambil beralasan akan pindah



DIDIK DWI PRAPTONO/RADAR BALI

ASPIDSUS: Polin Oktavianus Sitanggang.

kegiatan di Hotel Inna Bali Beach, Sanur.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kabar miring menerpa korp Adhiyaksa Bali. Kabar tak sedap yang tertuju pada penyidik Pidsus Kejati Bali itu menyusul adanya dugaan lobi-lobi para elit sehingga perkara kasus dugaan investasi di BPD Bali senilai Rp 200 miliar dihentikan dengan menerbitkan SP3. (pra/dot)

Edisi : Minggu, 27 Mei 2018

Hal : 3



Radar Bali

Tunggakan Bali Handara Rp 3,9 Miliar



EKA PRASETYA/RADAR BALI

CARI SOLUSI: Tim Evaluasi Pajak Daerah Kabupaten Buleleng saat bertatap muka dengan pihak Manajemen Bali Handara soal tunggakan pajak.

Kemarin, Tim Evaluasi Bertemu Pihak Manajemen

PANCASARI - Tim Evaluasi Pajak Daerah Kabupaten Buleleng, mulai mendatangi sejumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak fantastis. Selain itu tim juga akan mendatangi beberapa wajib pajak yang meminta penangguhan pajak dalam waktu panjang.

Pagi kemarin (23/5) tim mendatangi Hotel Bali Handara di Desa Pancasari. Tim dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Ketut Asta Semadi. Dalam tim juga terlihat Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Bimantara, serta Anggota Komisi III DPRD Buleleng Wayan Indrawan.

Berdasarkan catatan BKD Buleleng, hotel ini memiliki tunggakan cukup besar. Per tanggal 31 Desember 2017, tunggakan mencapai Rp 3,9 miliar. Terdiri dari pajak hotel Rp 288,7 juta; pajak restoran Rp 143,3 juta; pajak air tanah Rp 63,8 juta; serta pajak bumi dan bangunan senilai Rp 3,46 miliar. Tunggakan itu

merupakan akumulasi sejak tahun 2010 hingga 2017.

Sebenarnya pihak manajemen sudah berupaya menyelesaikan tunggakan pajak mereka secara bertahap. Selama ini manajemen hotel berupaya membayar tunggakan pajak sebesar Rp 10 juta per bulan. Hanya saja akumulasi tunggakan pajak terus meningkat, lantaran hotel juga dikenakan denda sebesar dua persen.

Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Ketut Asta Semadi mengatakan, tim mendatangi hotel untuk menanyakan komitmen soal penyelesaian tunggakan pajak. Saat ini Bali Handara masuk dalam status penagihan aktif. Artinya, wajib pajak memiliki itikad baik dan aktif berusaha menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Meski begitu pemerintah berharap manajemen mengambil langkah yang lebih konkrit untuk melunasi tunggakan pajak. Mengingat manajemen hanya bisa membayar pajak hingga Rp 120 juta per bulan. "Kami harap ada langkah konkrit dalam menyelesaikan tunggakan pajak ini. Karena denda ini kan terus terakumulasi. Kami khawatir beban wajib pajak semakin besar," kata Asta Semadi.

Tim juga meminta agar manajemen mempertimbangkan mengevaluasi fasilitas Lapan-

Edisi : Kamis, 24 Mei 2018
Hal. : 10



Radar Bali

Sambungan

gan Golf yang dimiliki hotel. Lantaran beban pajak tertinggi yang ditanggung wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan golf. Sementara itu General Manager Bali Handara, Ni Wayan Jarsen tak menampik kini pihaknya memiliki tunggakan pajak yang cukup besar. Manajemen berkomitmen melunasi pajak tersebut. Hanya saja pelunasan baru bisa dilakukan bertahap, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Salah satu yang menyebabkan manajemen terbebani adalah hotel beberapa kali dilanda bencana tanah longsor. Bencana itu menyebabkan puluhan kamar rusak dan merusak fasilitas golf. Biaya perbaikan pun tak sedikit, sehingga manajemen terpaksa meminta penangguhan pajak.

HASIL PERTEMUAN DENGAN BALI HANDARA

- Kemarin (23/5) tim evaluasi pajak mendatangi Hotel Bali Handara di Desa Pancasari.
- Per tanggal 31 Desember 2017, tunggakan mencapai Rp 3,9 miliar.
- Rinciannya; pajak hotel

- Rp 288,7 juta, pajak restoran Rp 143,3 juta, pajak air tanah Rp 63,8 juta, serta pajak bumi dan bangunan senilai Rp 3,46 miliar.
- Pihak manajemen sudah berusaha mengangsur, demikian pajak terakumulasi dengan denda 2 persen.
- General Manager Bali Handara Ni Wayan Jarsen mengaku pihaknya berkomitmen melunasi pajak tersebut.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

“Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Buleleng agar kami bisa membayar pajak yang belum terselesaikan dengan cara mencicil. Dan untuk pajak yang di tahun 2018 tetap kami bayar sesuai dengan waktunya,” kata Jarsen. Asal tahu saja, Bali Handara hanya salah satu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di Buleleng. Data di BKD Buleleng menunjukkan, ada ratusan wajib pajak yang masih menunggak pajak.

Hingga 31 Desember 2017, tercatat ada 41 wajib pajak yang menunggak pajak hiburan senilai Rp 167.321.455. Selain itu ada 165 wajib pajak menunggak pajak restoran senilai Rp 1.173.616.888, serta 223 wajib pajak lainnya memiliki tunggakan senilai Rp 2.145.036.438. Itu belum termasuk tunggakan dari sektor pajak bumi dan bangunan serta pajak air tanah. **(eps/gup)**



Radar Bali

PENGENDALI LAMPU LALIN ✓

Bangun di 10 Simpang, Habiskan Rp 9,3 Miliar

MANGUPURA-Pemerintah Kabupaten Badung kembali melanjutkan pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) atau sistem pengendali lampu lalu lintas. Pembangunan tahap III ini digelontor anggaran Rp 9,3 miliar lebih.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung Tofan Priyanto menerangkan, ATCS akan dibangun pada 10 titik. Di antaranya, Simpang Beraban di Kuta, Simpang Nakula, Simpang Camplung Tanduk, Simpang Batu Bolong di Kuta Utara, Simpang Kwanji, Simpang Bangsal, Simpang LPD Dalung, Simpang Pererenan di Mengwi, Simpang Seseh dan Simpang Abianbase. Anggaran bersumber dari APBD induk tahun 2018. Sekarang masih dalam proses tender di LPSE. Sementara target pengerjaan pembangunan ATCS harus sudah rampung sebelum akhir tahun. "Badung total punya 41 simpang. Sebanyak 20 sudah terbangun ATCS, termasuk bantuan dari APBN. Jadi masih kurang lagi 21 simpang yang belum ada ATCS. Pada pembangunan tahap III, kami rencana akan bangun di 10 titik," jelas Tofan, Rabu (23/5) kemarin.

Selain itu juga ada titik lainnya merupakan penambahan fasilitas saja. Sebab, sudah terpasang infrastrukturnya dan hanya tinggal menambah seperti kamera, menyambungkan kabel FO (fiber optic). "Untuk simpang yang belum tentu saja kami akan lanjutkan tahun berikutnya," pungkasnya. (dwi/dot)



Radar Bali

Peningkatan NPL Dipengaruhi Galian C

DENPASAR - Capaian kinerja industri perbankan di Provinsi Bali hingga posisi Maret 2018 tahun ini mengalami pertumbuhan. Diukur dari dana pihak ketiga (DPK), pada periode saat ini mencapai Rp 97,07 triliun. Meski tumbuh dari sisi aset 7,81 persen dari tahun sebelumnya, ternyata dari sisi *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah, masih lebih tinggi dari tahun lalu. NPL pada tahun ini tercatat sebesar 3,92 persen, sementara pada tahun lalu di periode yang sama mencapai 3,2 persen.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 8, Bali-Nusa Tenggara, Hizbullah mengatakan rasio NPL di Bali masih

diambang batas wajar, karena di bawah dari batas maksimal 5 persen. Rasio NPL yang terjadi pada periode ini, lebih banyak dipengaruhi oleh sektor pertambangan pasir dan pengalihan sebesar 13,33 persen. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum serta jasa perorangan yang melayani rumah tangga masing-masing menyumbang angka 9,99 persen dan 9,91 persen. "Kalau pertambahan ini dipengaruhi erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu," ujarnya kepada awak media, dalam pemaparan kinerja perbankan triwulan I, di Denpasar.

Penyaluran kredit pada sektor pertambangan pasir di

Karangasem lebih banyak disalurkan oleh BPR. Diakui, kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan oleh OJK masih belum menyentuh semua nasabah. Sehingga proses ini masih berlaku hingga tiga tahun. "kebanyakan BPR mengalami keterbatasan tenaga untuk mengurus kredit ini. Jadi memang harus bertahap," tambahnya.

Sementara untuk penyaluran kredit di Bali, tercatat bertumbuh sebesar 5,32 persen dengan nilai mencapai Rp 83 miliar. Penyaluran kredit terbesar berdasarkan wilayah, yakni Denpasar 54,59 persen, Badung 14,32 persen dan Buleleng dengan persentase penyaluran sebesar 8,39 pers-

en. "Ada tiga sektor yang paling banyak menyerap kredit pada periode ini. Sektor bukan lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, dan penyedia akomodasi makanan dan minuman," jelas Hizbullah.

Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali hingga posisi Maret mencapai 3,86 triliun dengan rasio NPL 0,62 persen. NPL KUR terbesar terjadi pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar 3,11 persen, sementara sektor real estate dan usaha persewaan 1,68 persen. "KUR ini lebih banyak diserap ke sektor perdagangan yang mencapai 62,67 persen," terang pria asal Padang ini. (zul/rid)

Edisi : Selasa, 22 Mei 2018

Hal. : 6



Radar Bali

Sambungan

OJK Awasi Tujuh BPR

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan insentif terhadap tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari total 136 BPR yang ada di Bali. Ini menyusul, penyaluran kredit yang kerap mengalami permasalahan. Kondisi ini membuat rasio NPL dari BPR mencapai 7,81 persen, meski diakui masih dibawah ambang batas maksimal yang mencapai 10 persen. "Tapi dengan capaian itu, kredit masalahnya terbilang tinggi," ujarnya Kepala OJK Regional 8, Bali Nusra,

Hizbullah.

Kondisi dari tujuh BPR yang ada di Bali, diakui belum begitu parah. Namun untuk mengantisipasi tingkat keparahan semakin tinggi, perlu adanya pengawasan dari OJK. "Perlu pengawasan, atau lampu kuning, agar tidak semakin terseok-seok," terangnya.

Masalah yang dihadapi BPR saat ini memang pada kualitas dan kuantitas SDM-nya. Bahkan berdasarkan data masih ada BPR yang struktur direksinya belum lengkap. Demikian pula

petugas lapangannya kurang. "Ada BPR yang direksinya baru satu, padahal seharusnya minimal dua. Demikian pula tenaga lapangannya sedikit sehingga hal ini menghambat operasional seperti penagihan," ujarnya.

Dengan adanya pengawasan dari OJK, diharapkan beberapa BPR yang masuk dalam daftar kuning di OJK bisa kembali normal. "Untuk pengetesan para direksi BPR, ini standarnya masih di Bawah Bank umum yang memang cukup ketat," pungkasnya. (zul/rid)

Edisi : Selasa, 12 Mei 2018

Hal. : 6



Sekwan Bungkam, Publik Tuntut Transparansi

DENPASAR- Plesiran Komisi 1 DPRD Provinsi Bali ke London, Inggris sejak Minggu-Sabtu (6-12/5) menuai respons. Publik menunggu pertanggungjawaban Ketut Tama Tenaya dan 11 anggota Komisi 1 lainnya atas kunjungan tersebut. Termasuk bukti surat undangan Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di London yang dipakai sebagai dasar seluruh anggota komisi yang membidangi masalah hukum itu terbang ke Negeri Ratu Elisabeth.

Guna memperoleh informasi yang valid, koran ini berusaha melakukan konfirmasi. Sayangnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) I Gusti Ngurah Alit memilih bungkam. Pesan Whatsapp koran ini pukul 10.43 hanya dibaca dan tidak dibalas. Walhasil jawaban atas pertanyaan untuk kepentingan apa, berapa biaya yang dihabiskan, sumber pembiayaan dari mana, dan sebagainya tidak didapat.

Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Ketut Tama Tenaya juga tidak bisa dihubungi. Sama seperti Ngurah Alit, pesan koran ini pada pukul 10.45 kemarin hanya dibaca.

Aktivis sekaligus dedengkot Yayasan Manikaya Kawuci, Nyoman Mardika meyakini seluruh perjalanan dinas yang



Anggota Dewan yang Diduga ke London

- I Ketut Tama Tenaya, SS, M, SI
- I Wayan Tagel Arjana, ST
- Dewa Nyoman Rai, SH
- I Nyoman Adnyana, SH, MM
- A.A KOMPIANG Raka, SH
- I Nyoman Oka Antara, SH., MAPDRs. I
- Wayan Gunawan
- I G.K Kresna Budi
- I Gusti Putu Widjera
- Ngakan Made Samudra, SH
- I Komang Nova Sewi Putra, SE
- I Nyoman Tirtawan

GRAFIS: GT DEWANTARA

dilakukan oleh oknum anggota dewan tentu sudah terencana. Lebih-lebih perjalanan dinas lintas negara. Oleh sebab itu, tidak ada istilah dadakan atau sembunyi-sembunyi. "Tidak boleh melakukan perjalanan dinas yang sembunyi-sembunyi karena mereka menggunakan anggaran publik (uang rakyat, Red)," ucapnya Jumat (11/5) kemarin.

Terkait kunjungan Komisi 1 DPRD Bali ke London, Mardika menyebut dokumentasi kegiatan wakil rakyat di sana sangat penting. Hal tersebut menjadi pertanggungjawaban tersendiri kepada

rakyat yang menggaji mereka. "Apa yang direncanakan dan dilakukan di sana? Kunjungan kerja seharusnya ada pertanggungjawaban juga. Bertemu siapa mereka? Duta Besar Inggris? Ketika bertemu apa yang mereka bicarakan? Itu harus jelas," tandas pria yang juga berstatus kelian banjar tersebut.

Lebih lanjut, Mardika menegaskan masyarakat Bali wajib menagih laporan kunjungan 12 anggota Komisi 1 DPRD Bali ke London. Pasalnya, jangan sampai masyarakat berpikir mereka menggunakan uang keringat rakyat untuk berse-

nang-senang menonton Liga Premier Inggris mengingat sang Ketua Komisi 1 DPRD Bali sempat berfoto di Stamford Bridge, markas tim papan atas Chelsea yang kini dibesut Antonio Conte. "Faktanya foto-foto itu (selfie di depan markas Chelsea, Red) yang dipertontonkan. Bisa jadi menyalahi aturan. Seharusnya foto-foto yang ditampilkan saat bertemu dengan Duta Besar Inggris atau bertemu masyarakat Indonesia, khususnya Bali yang ada di Inggris," pungkas Mardika. Foto, sambungnya merupakan bukti bahwa wakil rakyat kita memang melakukan studi banding ke London. Ditegaskannya, laporan pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas tersebut idealnya tidak hanya dilaporkan kepada Ketua DPRD Bali, melainkan juga kepada masyarakat Bali. "Kalau tidak ada berarti mereka melali (jalan-jalan, Red) menggunakan uang rakyat Bali. Logika sederhananya seperti itu. Masyarakat Bali juga harus diberikan penjelasan apa benefit atau keuntungan yang didapat masyarakat atas kunjungan anggota dewan ke London. Kalau tidak ada keuntungan, ngapain juga ke sana," ungkapnya. (ken/dot)

Edisi : Sabtu, 12 Mei 2018
Hal. : 4